



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUB UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DANU SUSWARYANTA**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **434240**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **714.472.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/526 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1100 m2/56 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 89.472.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **46.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI MOBIL ANGKUTAN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
2. MOTOR, HONDA MOTOR SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO MOTOR SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **245.459.038**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.005.931.038**

III. HUTANG Rp. **139.951.904**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **865.979.134**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.